



## Peran Aparatur Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 Di Kota Ambon

Muhammad Jen Latuconsina

Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Pattimura, Indonesia

[jendjunaidy@gmail.com](mailto:jendjunaidy@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis Peran Aparatur Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan in-depth interview dengan bantuan panduan wawancara. Penelusuran dokumen dilakukan secara langsung sambil mengamati, membaca dan memahami konsep, untuk memperoleh data sekunder pada laporan kerja, peraturan perundang-undangan, dan surat keputusan, brosur berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kualitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024 tak optimal. Pasalnya belum efektif dalam mengakselerasi verifikasi faktual partai politik. Kuantitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024 tak sebanding dengan luasnya pekerjaan. Dampaknya pada lamanya penyelesaian verifikasi faktual. Para aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon terkendala waktu penyelesaian pekerjaan, dimana hanya dua bulan sementara pekerjaannya begitu luas. Para aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon belum optimal dalam sosialisasi aturan teknis terbaru verifikasi faktual partai politik. Dampaknya pada ketidaksiapan partai politik untuk memenuhi aturan teknis terbaru itu.

**Kata kunci:** Aparatur Street-Level Bureaucratic, Verifikasi Faktual, Partai Politik

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the role of street-level bureaucracy apparatus in the implementation of factual verification of political parties ahead of the 2024 General Election in Ambon City. The data collection technique used was in-depth interviews supported by interview guidelines. Document analysis was conducted directly by observing, reading, and understanding the concepts to obtain secondary data from work reports, laws and regulations, decrees, and brochures related to the issues being studied. The data from this research were analyzed using a descriptive qualitative analysis technique. The results of the study show that the quality of the human resources of the street-level bureaucracy apparatus at the KPU Secretariat of Ambon City in the factual verification of political parties ahead of the 2024 General Election was not optimal. This is due to the ineffectiveness in accelerating the factual verification process. The quantity of street-level bureaucracy apparatus at the KPU Secretariat of Ambon City was also insufficient in comparison to the vast scope of work, which led to delays in the completion of the verification process. The street-level bureaucracy apparatus faced time constraints, as they were given only two months to complete an extensive workload. Furthermore, the street-level bureaucracy apparatus at the KPU Secretariat of Ambon City had not been optimal in disseminating the latest technical regulations regarding factual verification of political parties. As a result, political parties were unprepared to comply with the new technical requirements.*

**Key words:** Street-Level Bureaucracy Apparatus, Factual Verification, Political Parties

## PENDAHULUAN

Partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. (Amal, 2012 : XV). Begitu pun sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi.(Ilham&Lobolo,2012 :V). Memahami konteks partai politik tersebut, tentu kehadiran partai politik di Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hal yang mudah. Pasalnya persiapan partai politik menyangkut dengan berbagai dokumen administrasi perlu dipersiapkan secara komprehensif, agar bisa diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat hingga ke daerah sebagai persyaratan untuk berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Disamping partai politik mempersiapkan berbagai dokumen administrasinya, tak kalah penting para pegawai di jajaran KPU di tingkat Kabupaten/Kota memiliki peran strategis. Pasalnya mereka yang melakukan verifikasi faktual partai politik. Tatkala mereka melakukan tugas ini, maka para pegawai KPU Kabupaten/Kota tersebut telah berperan sebagai aparatur street-level bureaucratic. Hal ini sebagaimana penegasan Lipsky (1980:3) , dimana ia mendefinisikan street level bureaucrats sebagai pelayanan public yang berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya dan mereka juga memiliki diskresi dalam mengeksekusi pekerjaannya.

Senada dengan itu, Purwanto (2012:166) mengartikan street level bureaucrats sebagai sumber daya manusia di dalam birokrasi yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan, seperti : mendata kelompok sasaran yang eligible, melakukan sosialisasi, mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam perspektif aparatur street level bureaucrats di jajaran pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota telah memainkan perannya dengan mewujudkan verifikasi faktual partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khususnya peran pegawai KPU Kota Ambon sebagai aparatur street-level bureaucratic dilaksanakan secara riil tatkala pentahapan verifikasi faktual partai politik, dimana sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Verifikasi faktual partai politik tersebut berlangsung sejak 15 Oktober-04 November 2022. Verifikasi faktual partai politik yang substansial itu mencakup kantor sekretariat, pengurus dan keanggotaan partai politik.

Ditengah kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon, yang bertindak sebagai aparatur street-level bureaucratic dalam melakukan verifikasi partai politik pada sejumlah partai politik tersebut, mereka diperhadapkan dengan problem serius yakni, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), terbatasnya kapasitas pegawai yang tidak setara dengan jumlah pekerjaan dalam melakukan verifikasi faktual partai politik, terbatasnya waktu verifikasi faktual partai politik yang hanya dua bulan. Dari latar belakang masalah dan fenomena-fenomena diatas, menarik perhatian penulis untuk menggali makna sebenarnya dibalik fenomena-fenomena tersebut, dengan rumusan masalah adalah : Bagaimana peran aparatur street level bureaucracy dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon ?

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparatur street level bureaucracy dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik pada menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon. Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara akademik dan praktis. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, dan khususnya peran aparatur street level bureaucracy dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi KPU Kota Ambon dalam mengoptimalkan peran aparatur street level bureaucracy pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu 2029 mendatang di Kota Ambon.

## METODE

Lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon. Informan kunci penelitian ini ditentukan secara purposive, meliputi Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Sekretaris KPU Kota Ambon, 4 Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon, 4 Ketua Partai Politik, 4 Pengurus Partai Politik dan 2 Anggota Partai Politik, yang diambil secara aksidental. Karena itu, informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Untuk menghimpun data primer digunakan teknik Indepth Interview, dengan bantuan Indepth Guide, dimana pertanyaan dan jawaban bersifat langsung dan lisan, ditulis informan dalam bentuk transkrip lengkap sebagai dokumen penelitian lapangan. Selain itu, digunakan teknik dokumentasi dengan cara berusaha menelusuri, membaca dan memahami konsep, data sekunder secara langsung pada dokumen, laporan kerja, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, surat keputusan, dan brosur berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, menurut Miles dan Huberman (1992), diadaptasi oleh Sukardi (2009: 124), yakni pertama melakukan kegiatan reduksi data, kedua penyajian data, ketiga penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna mengetahui Peran Aparatur Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilu 2024 di Kota Ambon data direkam dari hasil wawancara dengan informan melalui empat dimensi dan sub-subnya, serta analisisnya, dapat dilihat sebagai berikut.

### **Kualitas SDM Aparatur Street Level Bureaucracy**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon memiliki peran penting dalam verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kota Ambon. SDM para aparatur street level bureaucracy itu mencakup pemahaman teknis verifikasi faktual partai politik, yang bersumber dari perundang-undangan. Seperti Seperti dikemukakan MZF Ketua KPU Kota Ambon, SBL, YK, RMBU, MZAM Anggota KPU Kota Ambon dan ZIR Sekretaris KPU Kota Ambon. (Maret, 2024) : *"Dalam verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kota Ambon, KPU Kota memperhatikannya. Ini terkait dengan pemahaman teknisnya, yang bersumber dari perundang-undangan. Ditemukan ada pegawai yang tak optimal memahami, kita tingkatkan melalui pembinaan internal."*

Kualitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon yang baik, akan mampu mensupport verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kota Ambon. Kualitas SDM aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon yang minim, perlu secara intens dilakukan pembinaan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam verifikasi faktual partai politik, yang sesuai dengan perundang-undangan. Seperti dikemukakan MAN Ketua DPC Perindo Kota Ambon, GM Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon, SS Ketua DPC Partai Hanura Kota Ambon, TA Ketua PPP Kota Ambon. (Maret, 2024) : *"Kualitas kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual sudah baik. Hanya sedikit yang tak optimal, tentu secara internal mereka perlu dibina sehingga lebih memahami teknis dari verifikasi faktual partai politik."*

### **Kuantitas SDM Aparatur Street Level Bureaucracy**

Aspek yang tak kalah penting menyangkut kuantitas aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon, dalam mendukung verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kota Ambon. Hal ini dikarenakan cakupan pekerjaan yang luas mencakup verifikasi sekretariat partai politik, anggota dan pengurus partai politik. Sementara dari sisi jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon yang kecil tidaklah cukup efektif menopang pekerjaan dimaksud. Seperti dikemukakan WM, AT, ET, JN para pegawai Sekretariat Kota Ambon. (Maret, 2024) : *"Sebagai pegawai KPU Kota Ambon yang melakukan verifikasi faktual partai politik diperhadapkan dengan jumlah pegawai yang minim, sementara cakupan pekerjaan yang luas."*

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon sebagai bagian aparatur street level bureaucracy dalam verifikasi faktual partai politik di Kota Ambon harus sebanding dengan luasnya pekerjaan. Jika tidak sebanding, verifikasi faktual partai politik tidak akan berjalan efektif. Seperti dikemukakan HU anggota DPD Partai Perindo Kota Ambon, JT anggota DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon, HD anggota DPC Partai Hanura, dan HS anggota DPC PPP Kota Ambon. (Maret, 2024) : *“Benar fakta dilapangan jumlah pegawai Sekretariat KPU saat verifikasi faktual partai politik di Kota Ambon, tak sebanding dengan luasnya pekerjaan mereka.”*

### **Waktu Verifikasi Faktual Oleh Aparatur Street Level Bureaucracy**

Dalam verifikasi faktual partai politik di Kota Ambon aspek waktu, tak sebanding dengan luasnya pekerjaan dari para pegawai selaku aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon. Dimana berlangsung 15 Oktober-04 November 2022, jumlah partai diverifikasi faktual sekretariat dan pengurus sebanyak 20. Verifikasi faktual anggota partai sebanyak 1.950. Begitu pula mereka diperhadapkan persoalan teknis data-data administratif partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang harus sama dengan fakta verifikasi faktual. Seperti dikemukakan MZF Ketua KPU Kota Ambon, SBL, YK, RMBU, MZAM Anggota KPU Kota Ambon dan ZIR Sekretaris KPU Kota Ambon. (Maret, 2024) : *“Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon dalam melakukan verifikasi faktual partai politik tak sebanding dengan luasnya pekerjaan, meski demikian mereka berupaya maksimal untuk menyelesaikan pekerjaannya.”*

Waktu verifikasi faktual yang hanya dua bulan, sementara jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon selaku aparatur street level bureaucracy yang minim dan jumlah pekerjaan yang luas, tentu tidaklah efektif dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik. Apalagi verifikasi faktual partai politik tersebut mencakup sekretariat, pengurus dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, tentu membutuhkan kuantitas pegawai yang optimal, sehingga bisa sukses menyelesaikan pekerjaannya. Seperti dikemukakan HPF pengurus Partai Perindo Kota Ambon, TMW pengurus DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon, MZK pengurus Partai Hanura Kota Ambon, dan FE pengurus PPP Kota Ambon. (Maret, 2024) : *“dari sisi waktu tidak efektif para ppgawai Sekretariat Kota Ambon dalam melakukan verifikasi faktual partai politik, karena waktunya hanya dua bulan. Sementara jumlah pegawai yang kecil dengan pekerjaan yang luas.”*

### **Sosialisasi Verifikasi Faktual Dari Aparatur Street Level Bureaucracy**

Menghadapi verifikasi faktual partai politik, para pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon, yang berperan sebagai aparatur street level bureaucracy juga turut dilibatkan dalam memberikan sosialisasi kepada partai politik di Kota Ambon. Hal ini agar partai politik mempersiapkan diri dalam pelaksanaan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2024 di Kota Ambon oleh KPU Kota Ambon. Sehingga verifikasi faktual bisa berjalan sukses. Seperti dikemukakan WM, AT, ET, JN para pegawai Sekretariat Kota Ambon. (Maret, 2024) : *“Kita pegawai KPU Kota Ambon dilibatkan dalam memberikan sosialisasi kepada partai politik di Kota Ambon, yang terkait dengan persiapan-persiapan dokumen administrasi untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik.”*

Aspek sosialisasi verifikasi faktual yang dilakukan para pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon, yang berperan sebagai aparatur street level bureaucracy memegang peran penting dalam mensupport verifikasi faktual. Pasalnya partai politik paham dan kemudian mereka mempersiapkan hal-hal teknis administratif, yang menjadi item-item dalam verifikasi faktual. Seperti dikemukakan HU anggota DPD Partai Perindo Kota Ambon, JT anggota DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon, HD anggota DPC Partai Hanura, dan HS anggota DPC PPP Kota Ambon. (Maret, 2024) : *“Para pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon memberikan sosialisasi kepada partai politik tentang persiapan hal teknis administratif sebagai bahan untuk verifikasi faktual. Namun terkadang ada aturan teknis verifikasi faktual terbaru melalui Peraturan KPU RI yang terlambat di sosialisasikan kepada partai politik”.*

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil analisis diatas, dibuat kesimpulan khusus, pertama kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu 2024 masih tak optimal. Pasalnya belum efektif



dalam mengakselerasi verifikasi faktual partai politik, kedua kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon dalam verifikasi faktual partai politik menjelang Pemilu 2024 tak sebanding dengan luasnya pekerjaan. Hal ini berdampak pada lamanya penyelesaian verifikasi faktual partai politik, ketiga para aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon terkendala waktu penyelesaian pekerjaan, dimana hanya dua bulan tidaklah efektif, sementara pekerjaan yang begitu luas, dan Keempat para aparatur street level bureaucracy di Sekretariat KPU Kota Ambon belum optimal dalam memberikan sosialisasi yang sifatnya insindesil menyangkut aturan teknis terbaru verifikasi faktual partai politik. Hal ini berdampak pada ketidaksiapan partai politik dalam menghadapi aturan teknis terbaru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama
- Castles, Lances. 2004. *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hariandja, MARIHAT TUA EFENDI. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Grasindo
- Ibnu, Tricahyono. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang, In-Trans Publishing
- Ilham Teguh, Lobolo Muhadum. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ikhsan, Darmawan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta, Kompas.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, New York, Russell Sage Foundation
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Purwanto, Agus Erawan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Inonesia*, Yogyakarta, Gava Media
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta, Bumi Aksara